

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Akbar, Patrialis. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. 2009. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Huda, Ni'matul. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia - Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Malang Corruption Watch. 2005. *Panduan Memahami Anggaran Publik*. Malang: Intrans.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*, cet IV. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahimullah. 2007. *Hukum Tata Negara, "Hubungan Antar Lembaga Negara"*. Jakarta: Gramedia
- Rai, I gusti Agung. 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik – Konsep, Praktik, Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2017. *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penulis Buku Panduan Penulisan Hukum. 2016. *Buku Panduan Penulisan Hukum (Skripsi)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Tjandra, Riawan. 2014. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2008. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Yuswanto. 2014. *Hukum Keuangan Negara*. Lampung: Justice Publisher.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Jurnal:

- Andini Rahmayanti P, Tugas dan Wewenang BPK Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan BUMN/D, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 1, No.1 Januari 2013.

Dessy Trisnawati Widyaningsih, Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pengawasan Pelaksanaan Ganti Kerugian Negara oleh Bendahara Melalui Jalur Non-Litigasi, *Diponegoro Law Journal*, Vol.6 No.3, Tahun 2017.

Website:

CTR CNN Indonesia, Catatan ICW: PNS Pemda Jadi Pelaku Korup Terbanyak di 2017, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180503164910-12-295476/catatan-icw-pns-pemda-jadi-pelaku-korup-terbanyak-di-2017>, pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 20.32

Katadata, BPK Temukan Rp13,24 Triliun Masalah Uang Negara di Semester II-2017, <https://katadata.co.id/berita/2018/04/03/bpk-temukan-rp-1324-triliun-masalah-uang-negara-di-semester-ii-2017>, pada tanggal 30 Juli 2018

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, <http://bpk.go.id/page/sejarah> diakses pada tanggal 27 September 2018

Kemenkeu, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>, diakses pada tanggal 23 November 2018

Wawancara:

Tri Joko Prakoso, wawancara, Staf Litbang Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan 8 Oktober 2018.

Radhityo Fitrian, wawancara, Staf Litbang Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan. 10 Oktober 2018.

Laporan Pemeriksaan:

Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat (LHPP) BPK RI Pusat.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK RI Pusat.